



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan dan KESIAPSIAGAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HARYONO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 121486

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.212.000.000**

1. Tanah Seluas 2408 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 133 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 266.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/70 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/70 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 382.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2407 m2/100 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/76 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 185.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2021, LAINNYA Rp. 15.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.868.824
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.433.368.824
III. HUTANG	Rp.	801.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.632.368.824

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.